

IMPLEMENTASI DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN ANAK

(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Lamongan No: 227 Pid.B/2010/PN.Lmg)

SKRIPSI

Dalam Rangka Memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas
Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”
Jawa Timur



Disusun oleh :

ADE RAHMAD SETYAJI
NIM : 0771010016

YAYASAN KESEJAHTERAAN PENDIDIKAN DAN PERUMAHAN
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR
SURABAYA
2011

PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI

IMPLEMENTASI DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN ANAK
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Lamongan No : 227 Pid.B/2010/PN.Lmg)

Disusun oleh :

ADE RAHMAD SETYADI
NPM. 0771010016

Telah disetujui untuk mengikuti Ujian Skripsi

Menyetujui

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Hariyo Sulistiyantoro, SH, MM
NIP. 19 62062199103 1001

YANA INDAWATI.S.H.,M.Kn.
NPT: 3 7901 07 0224

Mengetahui
DEKAN

Hariyo Sulistiyantoro, SH, MM
NIP. 19 62062199103 1001

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

IMPLEMENTASI DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN ANAK
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Lamongan No : 227 Pid.B/2010/PN.Lmg)

Disusun Oleh :

ADE RAHMAD SETYADI
NPM. 0771010016

Telah dipertahankan dihadapan dan diterima oleh tim penguji skripsi
program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas
Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

pada tanggal 10 desember 2011

Pembimbing utama

Tim penguji :

1.

Hariyo Sulistiyantoro, SH, MM
NIP. 19 62062199103 1001

Sutrisno,SH.,M.H
NIP.19601212 198803 1001

2.

Pembimbing Pendamping

Subani.SH.,M,Si
NIP. 19510504 198303 1001

3.

Yana Indawati.SH.,M.Kn.
NPT: 3 7901 07 0224

Hariyo Sulistiyantoro,SH.,MM
NIP. 19 62062199103 1001

Mengetahui
DEKAN

Hariyo Sulistiyantoro, SH, MM
NIP. 19 62062199103 1001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ade Rahmad Setyadi
Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya, 29 08 1989
Konsentrasi : Pidana
Alamat : Perum. Sidokare Asri uu-08 Candi-Sidoarjo

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul :
IMPLEMENTASI DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN ANAK (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Lamongan No: 227 Pid.B/2010/PN.Lmg dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur adalah benar-benar hasil karya cipta saya sendiri, yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (Plagiat)

Apabila dikemudian hari ternyata skripsi ini hasil jiplakan (Plagiat), maka saya bersedia dituntut di depan pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaan (Sarjana Hukum) yang saya peroleh.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Mengetahui Surabaya, 6 Desember 2011

A.n Ketua Program Studi

Penulis,

SES.PROGDI

Fauzul Aliwarman, SH., M.Hum.
NPT. 3 8202 07 0221

Ade Rahmad Setyadi
NPM.0771010016

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji syukur kehadirat Allah SWT. Atas segala rahmat dan karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “IMPLEMENTASI DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN ANAK (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Lamongan No: 227 Pid.B/2010/ PN.Lmg)”.

Penyusunan Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan sesuai kurikulum yang ada di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. Disamping itu dapat memberikan hal-hal yang berkaitan dengan disiplin ilmu dalam mengadakan penelitian guna penyusunan skripsi.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan dan bimbingan serta saran yang sangat berharga kepada :

1. Bapak Haryo Sulistiyantoro, SH, MM, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur dan selaku dosen wali yang sudah banyak membantu penulis selama kuliah di Program Studi Ilmu Hukum tercinta ini sekaligus dosen pembimbing utama yang banyak membantu untuk terselesainya skripsi ini.
2. Bapak Sutrisno, SH, M.Hum, selaku wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
3. Bapak Drs. EC Gendut Soekarno, MS selaku Wadek II Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

4. Bapak Panggung Handoko.,Ssos,SH,MM ,selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
5. Ibu Yana Indawati, SH, M.Kn, sebagai dosen pembimbing pendamping meluruskan kesalah-kesalahan penulis.
6. Tim Penguji pada Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional ”Veteran” Jawa Timur yang telah memberikan masukan dan diskusinya selama menjadi tim penguji.
7. Bapak Sariyanto selaku Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur beserta staf yang memberi pelayanan pengurusan administrasi.
8. Bapak Boyke.,SH selaku Jaksa Muda Kejaksaan Negeri Sidoarjo yang telah memberikan kritik dan saran atas terselesainya skripsi ini.
9. Ibu Rida.,SH.,M.Hum, selaku Hakim Peradilan Anak yang telah banyak membantu untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Kedua Orang Tua penulis yang memberi banyak dukungan serta motivasi sehingga dapat terselesainya proposal skripsi.
11. Teman-teman seperjuangan dan slankers facebook community surabaya yang setia mendukung dan memberikan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
12. Istri penulis Bunga Merilla Rahma Zita dan kedua anak penulis Surya Muhammad Nur dan Wahyu Aji Pamungkas yang sudah mendukung dan memberikan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu saran dan kritik yang sifatnya membangun penulis harapkan guna perbaikan dan penyempurnaan sehingga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi semua pihak.

Surabaya, Desember 2011

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN REVISI SKRIPSI	iv
SURAT PERNYATAAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xi
ABSTRAKSI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Manfaat Penelitian	7
1.5. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana	7
1.5.1 Tinjauan tentang Implementasi Diversi dalam Sistem Peradilan Anak	14
1.6. Jenis dan Tipe Penelitian	27
1.6.1 Sumber Data dan bahan Hukum	28
1.6.2 Jenis Data	28
1.6.3 Bahan Hukum	28

1.6.4	Metode Pengumpulan Data dan Pengolahan Data	29
1.6.5	Metode Analisis Data	30
1.6.6	Lokasi Penelitian	30
1.6.7	Sistematika Penulisan	31
BAB II	PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBERIKAN PUTUSAN	
	Diversi Atas Kasus No. 227/PidB/2010/PN.Lmg	33
2.1.	Disposisi Kasus.....	33
2.2.	Pertimbangan Hakim atas Putusan Kasus No. 227/PidB/2010/PN.Lmg	35
2.3.	Analisa Pertimbangan Hakim atas Putusan Kasus No.227/PidB/2010/PN.Lmg	40
BAB III	HAMBATAN DALAM PENERAPAN DIVERSI ATAS PERADILAN ANAK	46
3.1.	Analisis Hambatan atas Kasus No.227/PidB/2010/PN.Lmg .	46
BAB IV	KESIMPULAN DAN SARAN	48
4.1.	Kesimpulan	48
4.2.	Saran	49
	DAFTAR PUSTAKA	50

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Putusan Pengadilan Negeri Lamongan No:227 Pid.B/2010/PN.Lmg

Lampiran II : Jurnal mengenai PENERAPAN KONSEP DIVERS TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA DALAM SISTEM PERADILAN ANAK

Lampiran III : Surat Keterangan Penelitian di Pengadilan Negeri Lamongan

ABSTRAKSI

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
Fakultas Hukum

Nama Mahasiswa : Ade.Rahmad.Setyadi
NIM : 0771010016
Tempat Tanggal Lahir : Surabaya, 29 Agustus 1989
Program Studi : Strata 1 (S1)
Judul Skripsi :

IMPLEMENTASI DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN ANAK
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Lamongan No: 227 Pid.B/2010/PN.Lmg)

ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Diversi dalam Sistem Peradilan Anak yang berhadapan dengan hukum dan yang melakukan tindak pidana. Penelitian ini menggunakan metode ormatif merupakan penelitian kepustakaan yang sepenuhnya mempergunakan data sekunder, apat dipergunakan perumusan yang terdapat di dalam peraturan perundang yang dapat dijadikan dasar penelitian, atau yang hendak diteliti. Analisis data menggunakan analisa kualitatif dan kuantitatif serta menggunakan Undang-ndang No. 3 Tahun 1997, Tentang Pengadilan Anak serta Undang-Undang No. 23 Tahun 2004, Tentang Pengadilan Anak. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Diversi dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar hukum agar menjadi orang yang baik kembali melalui jalur non formal dengan melibatkan sumber daya masyarakat. Diversi berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum sebagai pihak penegak hukum.

Kata Kunci : Diversi, Sistem Peradilan Anak, Pengadilan Anak

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Anak merupakan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta. Hal ini sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, kemudian juga dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 (Selanjutnya disingkat dengan UU Perlindungan Anak) tentang Perlindungan Anak yang kesemuanya mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, dan menghargai partisipasi anak. Kurang lebih dari 4.000 anak Indonesia diajukan ke pengadilan setiap tahunnya atas kejahatan ringan, seperti pencurian. Pada umumnya mereka tidak mendapatkan dukungan, baik dari pengacara maupun dinas sosial.

Dengan demikian, tidak mengejutkan jika sembilan dari sepuluh anak dijebloskan ke penjara atau rumah tahanan. Sebagai contoh sepanjang tahun 2000 tercatat dalam statistik kriminal Direktorat Jenderal

Pemasyarakatan (Ditjenpas) terdapat lebih dari 11.344 anak yang disangka sebagai pelaku tindak pidana.

Hal ini dapat dilihat dari jumlah anak didik dari tahun pertahun cenderung bertambah Pada tahun 2005 berjumlah 1645, pada tahun 2006 berjumlah 1814, pada tahun 2007 berjumlah 2149, pada tahun 2008 berjumlah 2726, pada tahun 2009 berjumlah 2536 tahanan anak di rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan di seluruh Indonesia¹. Kemudian pada tahun 2008 di provinsi Jawa Timur tercatat anak yang berstatus anak didik (anak sipil, anak Negara, dan anak pidana) tersebar di seluruh Rutan dan LP untuk orang dewasa sebanyak 2026². Kondisi ini sangat memprihatinkan karena banyak anak yang harus berhadapan dengan sistem peradilan dan mereka ditempatkan di tempat penahanan dan pemenjaraan bersama orang dewasa sehingga mereka rawan mengalami tindak kekerasan.

Melihat prinsip tentang perlindungan anak terutama prinsip non diskriminasi yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dan hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan berkembang sehingga diperlukan penghargaan terhadap pendapat anak.³ maka diperlukan proses penyelesaian perkara anak diluar mekanisme pidana atau biasa disebut diversi, karena lembaga pemasyarakatan bukanlah jalan untuk

1. < <http://www.Ditjenpas.go.id/index.php> ? Option = com_content & task = view&id = 34&Itemid =45>, diakses pada hari selasa tanggal 22 Desember 2009 pukul 20.00wib

2. <http://www.menegpp.go.id/>, diakses pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2011 pukul 10.00 wib

3. DS.Dewi,Fatahilla A.Syukur, Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia, Indie Pre Publishing, Depok, 2011, hal : 13

menyelesaikan permasalahan anak dan justru dalam LP rawan terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hak anak. Oleh karena itulah mengapa diversi khususnya melalui konsep Restorative Justice menjadi suatu pertimbangan yang sangat penting dalam menyelesaikan perkara pidana yang dilakukan oleh anak.

Seorang anak yang tengah melakukan tindak pidana wajib disidangkan di pengadilan khusus anak yang berada di lingkungan peradilan umum, dengan proses khusus serta pejabat khusus yang memahami masalah anak, mulai dari penangkapan, penahanan, proses mengadili dan pembinaan. Seorang anak yang tengah melakukan tindak pidana wajib disidangkan di pengadilan khusus anak yang berada di lingkungan peradilan umum, dengan proses khusus serta pejabat khusus yang memahami masalah anak, mulai dari penangkapan, penahanan, proses mengadili dan pembinaan.

Sementara itu dari perspektif ilmu pembedaan, meyakini bahwa penjatuan pidana terhadap anak nakal (delinkuen) cenderung merugikan perkembangan jiwa anak di masa mendatang. Kecenderungan merugikan ini akibat dari efek penjatuan pidana terutama pidana penjara, yang berupa stigma (cap jahat). Dikemukakan juga oleh Barda Nawawi Arief (1994)⁴, Bahwa hukum perlindungan sosial mensyaratkan penghapusan pertanggungjawaban pidana (kesalahan) dan digantikan tempatnya oleh pandangan tentang perbuatan anti sosial.

4. Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara, CV Ananta, Semarang, 1994 hal.20

Berdasarkan hasil studi perbandingan efektivitas pidana dari Komite Hak Anak PBB , angka perbandingan rata-rata pengulangan atau penghukuman kembali (reconviction rate) orang yang pertama kali melakukan kejahatan berbanding terbalik dengan usia pelaku. Revonviction rate yang tertinggi, terlihat pada anak-anak, yaitu mencapai 50 persen. Angka itu lebih tinggi lagi setelah orang dijatuhi pidana penjara daripada pidana bukan penjara hal ini di karenakan tingginya jumlah anak yang dipenjarakan karena kejahatan ringan, dicampurnya tahanan anak bersama orang dewasa dan batas yang terdapat dalam UU Pengadilan Anak sangatlah rendah (8 tahun), karena itu harus dinaikkan agar lebih rasional menjadi (12 tahun) sesuai dengan Beijing Rules ⁵.

Substansi yang diatur dalam UU Perlindungan Anak pasal 64⁶ bentuk perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan kasus hukum dan anak korban tindak pidana, dan yang paling mendasar dalam Undang-Undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai Restoratif Justice dan Diversi, yaitu dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan Anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan Anak dapat kembali kedalam lingkungan sosial secara wajar. Oleh karena itu sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam rangka mewujudkan hal tersebut. Pada akhirnya proses ini harus bertujuan pada terciptanya keadilan restoratif baik bagi Anak maupun bagi Anak sebagai Korban.

5. Ib id, hal 18

6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak, Pustaka Yustisia, Yogyakarta , hal.83

Keadilan restoratif merupakan suatu proses diversi dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah, menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan Anak Korban, Anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menentramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan. Namun pada dasarnya, Undang-Undang No 3 Tahun 1997 Tentang Sistem Pengadilan Anak ini mengatur mengenai keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

dengan prinsip kepentingan terbaik anak, hubungan keluarga tetap dipertahankan artinya anak yang berhadapan dengan hukum kalau bisa tidak ditahan/dipenjarakan walaupun dipenjarakan/ditahan, ia dimasukkan dalam ruang tahanan khusus anak dan tidak bersama orang dewasa.

Anak yang melakukan tindak pidana atau dalam praktek sehari-hari di pengadilan disebut sebagai anak yang sedang berhadapan dengan hukum, harus diperlakukan secara manusiawi, didampingi, disediakan sarana dan prasarana khusus, sanksi yang diberikan kepada anak sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik anak, hubungan keluarga tetap dipertahankan artinya anak yang berhadapan dengan hukum kalau bisa tidak ditahan/dipenjarakan walaupun dipenjarakan/ditahan, ia dimasukkan dalam ruang tahanan khusus anak dan tidak bersama orang dewasa. Selain itu, diberikan pula jaminan perlindungan terhadap anak-anak yang

berhadapan dengan hukum ditetapkan sebagai kelompok anak yang membutuhkan ”Perlindungan Khusus”.

Mendidik anak merupakan hal yang penting untuk mempersiapkan generasi muda Indonesia yang akan datang. Mengenalkan hukum dan mengajarkan anak untuk taat hukum sejak dini juga perlu dilakukan oleh orang tua dan pendidik di sekolah. Hukum juga harus memberikan ruang bagi anak untuk terus berkembang dan terlindungi sesuai kapasitas pertumbuhannya. Untuk itu diharapkan generasi muda di masa datang lebih bisa mentaati hukum yang berlaku

1.2. Rumusan Masalah

Sehubungan dengan latar belakang pemilihan judul di atas, maka timbul permasalahan yang akan diangkat dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Apa pertimbangan hakim dalam memberikan putusan diversi atas kasus no : 227 pid.B/2010/PN.Lmg?
2. Bagaimana hambatan dalam penerapan diversi atas sistem peradilan anak?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan Skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui tentang pertimbangan Hakim dalam memberi putusan terhadap implementasi diversi dalam sistem peradilan anak
2. Untuk mengetahui tentang hambatan dalam penerapan diversi

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai oleh penulis dalam Skripsi ini mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, sebagai berikut:

- 1) Penulisan ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis, mahasiswa, pemerintah, maupun masyarakat umum mengenai implementasi diversi dalam sistem peradilan anak. dapat menambah perbendaharaan atas kepustakaan hukum pidana.
- 2) Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pemerintah, pembentuk Undang-undang, serta masyarakat.
- 3) Untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti sehingga hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan masukan dan pemikiran serta menambah pengetahuan mengenai konsep diversi.

1.5. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

a. Pengertian Tindak Pidana

”Peristiwa Pidana” atau ”Tindak Pidana” adalah sebagai terjemahan dari istilah bahasa Belanda ”*strafbaar feit*” yaitu suatu tindakan pada Tempat, Waktu dan Keadaan tertentu, yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh Undang-undang, Bersifat Melawan Hukum, serta dengan Kesalahan, dilakukan oleh Seseorang (yang mampu bertanggung jawab).⁷

7. Moeljatno, Azas-Azas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, 1998, hal 56

Beberapa sarjana telah berusaha untuk memberikan perumusan tentang pengertian dari peristiwa pidana, diantaranya: Moeljatno cenderung lebih suka menggunakan kata "perbuatan pidana" daripada kata "tindak pidana". Menurut beliau kata "tindak pidana" dikenal karena banyak digunakan dalam perundang-undangan untuk menyebut suatu "perbuatan pidana". Moeljatno berpendapat bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut⁸.

Perumusan peristiwa pidana menurut Prof. Simons adalah "Een strafbaargelesetelde, onrechtmatige, met schuld in verband standee handelling van een teorekeningvatbar person". Adapun maksud dari perumusan tersebut adalah salah dan melawan hukum yang diancam pidana dan dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab. Perumusan simons tersebut menunjukan unsur-unsur peristiwa pidana diantaranya handling (perbuatan manusia) dimana perbuatan manusia tidak hanya eendoen (perbuatan) akan tetapi juga een natalen atau niet doen (melakukan atau tidak berbuat)⁹.

b. Macam-macam Tindak Pidana

1. Tindak Pidana Umum

Tindak pidana dapat dibagi-bagi dengan menggunakan berbagai kriteria. Pembagian ini berhubungan erat dengan berat ringannya ancaman, sifat, bentuk dan perumusan suatu tindak pidana. Perbedaan ini erat pula hubungannya dengan ajaran-ajaran umum hukum pidana. Dengan membagi sedemikian itu sering juga dihubungkan dengan akibat-akibat hukum yang penting.

8. Ibid, hal 56

9. C.S.T.Kansil dan Christine S.T.Kansil, Pokok-Pokok Hukum Pidana, cetakan ke-1, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hal.37.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Selanjutnya disingkat dengan KUHP) yang berlaku sekarang diadakan tiga macam pembagian title (bab), yaitu buku I tentang peraturan umum, buku ke II tentang kejahatan, dan yang ditempatkan dalam buku ke-III tentang pelanggaran

Buku I yang dinamakan peraturan umum adalah :

Percobaan.

Lingkungan berlakunya ketentuan pidana dalam Undang-Undang. Hukuman-hukuman.

Pengecualian, pengurangan, dan penambahan hukuman.

Turut serta melakukan perbuatan yang dapat di hukum.

Gabungan perbuatan yang dapat di hukum.

Memasukan dan mencabut pengaduan dalam perkara kejahatan, yang hanya boleh dituntut atas pengaduan.

Gugurnya hak menuntut hukuman, dan gugurnya hukuman.

Arti beberapa sebutan dalam kitab Undang-Undang.

Buku II yang dinamakan kejahatan adalah :

Kejahatan terhadap keamanan Negara.

Kejahatan terhadap ketertiban umum.

Kejahatan melanggar martabat kedudukan Presiden dan wakil Presiden.

Kejahatan terhadap Negara yang bersahabat dan terhadap kepala dan wakil Negara yang bersahabat.

Perkelahian satu lawan satu.

Kejahatan yang mendatangkan bahaya bagi keamanan umum manusia atau barang.

Kejahatan terhadap kekuasaan umum.

Sumpah palsu dan keterangan palsu.

Memalsukan mata uang dan dan uang kertas Negara serta uang kertas bank.

Memalsukan materai dan merek.

Memalsukan surat-surat.

Kejahatan terhadap kedudukan warga.

Kejahatan terhadap kesopanan.

Meninggalkan orang yang memerlukan pertolongan.

Penghinaan.

Membuka rahasia.

Kejahatan terhadap kemerdekaan seseorang.

Kejahatan terhadap jiwa orang.

Penganiayaan.

Mengakibatkan orang mati karena kesalahannya.
 Pencurian.
 Pemerasan dan ancaman.
 Penggelapan.
 Penipuan.
 Menghancurkan dan merusak barang.
 Kejahatan pelayaran.
 Kejahatan yang dilakukan dalam jabatan.
 Pertolongan (jahat).
 Kejahatan Penerbangan, dan kejahatan terhadap sarana /
 penerbangan.
 Buku III yang dinamakan Pelanggaran adalah :
 Pelanggaran keamanan umum bagi orang lain dan kesehatan umum.
 Pelanggaran tentang ketertiban umum.
 Pelanggaran tentang kekuasaan umum.
 Pelanggaran tentang kedudukan warga.
 Pelanggaran tentang orang yang perlu ditolong.
 Pelanggaran tentang kesopanan.
 Pelanggaran dilakukan dalam jabatan.
 Pelanggaran polisi daerah.
 Pelanggaran dalam pelayaran.

2. Tindak Pidana Khusus

Tindak pidana khusus ini dikategorikan tindak pidana yang sifatnya tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana namun ada aturan tersendiri yang mengatur di dalam tindak pidana tersebut. Tindak pidana khusus ini meliputi antara lain :

1. Terorisme.
2. Narkotika dan psykotropika.
3. Korupsi.
4. Perlindungan Anak.
5. Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)
6. Militer.
7. Money laundry.
8. Ham.

c. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur yang terkandung di dalam tindak pidana di Indonesia menurut Simons antara lain sebagai berikut :

- a. Perbuatan manusia.
- b. Diancam dengan pidana.
- c. Melawan hukum.
- d. Dilakukan dengan kesalahan.
- e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab

d. Asas-Asas Hukum Pidana

Asas-asas hukum pidana terdiri dari beberapa asas yaitu sebagai berikut :

Penafsiran peraturan-peraturan pidana itu hanya berdasarkan arti kata-kata, yang terdapat di dalam aturan pidana itu saja.

Tidak ada hukuman jika tidak ada kesalahan.

Hukuman pidana menjatuhkan sanksinya, yaitu hukuman jika di langgar.

Yang dapat di hukum hanya orang biasa saja, sedangkan badan hukum tidak

Asas Teritoroaliteit yaitu orang baik orang Indonesia, maupun orang asing yang telah melakukan kejahatan di dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, di adili oleh hakim Indonesia, di dalam asas ini orang menitik beratkan pada dimana tindak pidana itu telah dilakukan.

Asas Personaliteit aktif yaitu setiap orang Indonesia, baik ia ada di Indonesia, ataupun di luar Indonesia, di kenakan hukum pidana Indonesia, di mana saja ia melakukan kejahatan.

Asas Personaliteit pasif yaitu hukum pidana itu berlaku di mana saja dan terhadap siapa saja, jika kepentingan-kepentingan nasional tertentu di langgar atau di nodai.

Asas Universaliteit yaitu tiap-tiap Negara dengan hukum pidananya berkewajiban untuk menjaga dan memelihara jangan sampai ketertiban di seluruh dunia itu dilanggar

e. Asas-Asas Hukum Acara Pidana

Terdapat asas yang terkandung dalam Hukum Acara Pidana, asas-asas tersebut yang terkandung di dalam Hukum Acara Pidana yaitu :

Asas Legalitas.

Asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan

Pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum.

Asas Praduga Tidak Bersalah.

Asas Oportunitas (suatu asas yang berlaku di negeri ini sekalipun sebagai hukum tak tertulis yang berlaku)¹⁰

Pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum.

Semua orang diberlakukan sama di depan Hakim.

Asas peradilan dilakukan oleh hakim karena jabatannya.

Asas Accusatoir (sistem pemeriksaan perkara seperti ini dimana kedudukan orang yang menuduh dan orang yang dituduh dimuka pemeriksaan sama tingginya) dan Inquisitoir (sistem penuntutan yang berat sebelah, dimana kedudukan tertuduh dan yang menuduh tidak sama tingginya dan tidak seimbang itu dalam ilmu pengetahuan)¹¹

Pemeriksaan hakim yang langsung dan lisan.¹²

f. Pertanggung Jawaban Pidana

Berbicara mengenai pertanggung jawaban pidana maka akan selalu mengaitkannya dengan adanya kesalahan yang melanggar larangan pidana dan kemampuan bertanggungjawab, tanggungjawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu (apabila terjadi apa-apa, boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya). Tindak pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Namun orang yang melakukan tindak pidana belum tentu dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan, hal ini tergantung pada “apakah dalam melakukan perbuatan ini orang tersebut mempunyai kesalahan“, yang merujuk kepada asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana : “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (geen straf zonder schuld ; actus non facit reum nisi mens sir rea)”. Asas ini memang tidak diatur dalam hukum tertulis tapi dalam hukum tidak tertulis yang juga berlaku di Indonesia.

10. Ibid hal. 15

11. R.Soesilo hukum acara pidana, Politea,Bogor, 1982, hal 14 - 15

12. Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia , Sinar Grafiaka, Jakarta ,2006, hal 10.

Pertanggung jawaban pidana dalam istilah asing disebut juga dengan teorekenbaardheid atau criminal responsibility yang menjurus kepada pembedaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk lebih memahami tentang pertanggungjawaban dalam hukum pidana maka kita harus mengetahui apa sebenarnya arti kesalahan itu :

“orang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, jika dia pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karenanya, yaitu kenapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat padahal mampu mengetahui makna (jelek) perbuatan tersebut, dengan kata lain perbuatan tersebut memang sengaja dilakukan. Penjelasan arti kesalahan, kemampuan bertanggung jawab dengan singkat diterangkan sebagai keadaan batin orang yang normal dan sehat.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ada ketentuan tentang arti kemampuan bertanggungjawab, hanya dijelaskan mengenai kemampuan bertanggung jawab yaitu dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP :

“Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau jiwa yang terganggu karena penyakit, tidak dapat dipidana.”

KUHP memberikan devinisi ketidakmampuan bertanggung jawab ditandai oleh salah satu dari dua hal yaitu jika cacat atau jiwa yang terganggu karena penyakit. Tidak mampu bertanggungjawab adalah ketidaknormalan keadaan batin pembuat karena cacat jiwa atau gangguan penyakit jiwa, Sehingga padanya tidak memenuhi persyaratan untuk diperiksa. Dengan kata lain seseorang dipandang bertanggungjawab jika tidak ditemukan keadaan-keadaan tertentu. Maka dari keterangan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian pertanggung jawaban pidana yaitu kemampuan seseorang untuk menerima resiko dari perbuatan yang diperbuatnya sesuai dengan undang-undang.

1.5.1. Tinjauan tentang Implementasi Diversi dalam Sistem Peradilan Anak

a) Pengertian tentang anak

Anak merupakan bagian dari generasi muda yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri-ciri dan sifat khusus. Oleh karena itu anak memerlukan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi selaras, dan seimbang. Dengan Undang-Undang N0 3 Tahun 1997 Tentang pengadilan anak. (Selanjunya disingkat dengan UU Pengadilan Anak) Ketentuan pasal 1 angka 1, pasal 2 angka 2a dan 2b menyatakan secara jelas status dan kedudukan anak yang menyebutkan bahwa:

Pasal 1 angka 1 UU Pengadilan Anak

Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur delapan tahun, tetapi belum mencapai umur delapan belas tahun dan belum pernah kawin.¹³

Pasal 1 angka 2a UU Pengadilan Anak

- a. Anak yang melakukan tindak pidana atau
- b. Anak melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang undangan maupun menurut peraturan hukum lain hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Anak lebih diutamakan dalam pemahaman terhadap hak-hak anak yang harus dilindungi, karena secara kodrat memiliki substansi yang lemah (kurang) dan di dalam hukum dipandang sebagai subyek hukum yang di tanamkan dari bentuk pertanggungjawaban, sebagaimana layaknya seorang subyek hukum yang normal. Pengertian anak dalam lapangan hukum pidana menimbulkan aspek hukum positif terhadap proses normalisasi anak dari perilaku menyimpang (Kejahatan dan pelanggaran pidana) untuk membentuk kepribadian dan tanggungjawab yang akhirnya anak tersebut berhak atas kesejahteraan yang layak dan masa depan yang lebih baik. UU Pengadilan Anak.

13. Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2007 Tentang Pengadilan Anak, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hal 16

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Batas usia anak memberikan pengelompokan terhadap seseorang untuk dapat disebut sebagai seorang anak. Yang dimaksud dengan batas usia anak adalah pengelompokan usia maksimal sebagai wujud kemampuan anak dalam status hukum sehingga anak tersebut beralih status menjadi usia dewasa atau menjadi seorang subyek hukum yang dapat bertanggungjawab secara mandiri terhadap perbuatan-perbuatan dan tindakan-tindakan hukum yang dilakukan anak itu. Batas usia anak dalam pengertian hukum pidana dirumuskan secara jelas dalam ketentuan hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Pengadilan Anak pada pasal 1 angka 1 sebagai berikut:

“Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin“.

Anak dalam pemaknaan yang umum mendapat perhatian tidak saja dalam bidang ilmu pengetahuan, tetapi dapat ditelaah dari sisi pandang sentralistik kehidupan agama, hukum dan sosiologi yang menjadikan pengertian anak semakin rasional dan aktual dalam lingkungan sosial, sebab anak merupakan suatu anugrah dari Tuhan yang berharga dan tidak dapat dinilai dengan nominal.

b) Pengertian Diversi

Diversi adalah sebuah tindakan atau perlakuan untuk mengalihkan atau menempatkan pelaku tindak pidana anak keluar dari sistem peradilan pidana¹⁴.

Restorative Justice adalah Penyelesaian pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan membawa korban dan pelaku (tersangka) bersama-sama duduk dalam satu pertemuan untuk bersama-sama berbicara¹⁵.

Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) adalah segala unsur sistem peradilan pidana yang terkait di dalam penanganan kasus-kasus kenakalan anak. Pertama, polisi sebagai institusi formal ketika anak nakal pertama kali bersentuhan dengan sistem peradilan, yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses lebih lanjut. Kedua, jaksa dan lembaga pembebasan bersyarat yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak. Ketiga, Pengadilan Anak, tahapan ketika anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman. Sehubungan dengan hal ini, Muladi yang menyatakan bahwa criminal justice system memiliki tujuan untuk : (i) resosialisasi dan rehabilitasi pelaku tindak pidana; (ii) pemberantasan kejahatan; (iii) dan untuk mencapai

14. [http:// doktormarlina.htm](http://doktormarlina.htm) Marlina, Penerapan Konsep Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak .Diakses hari sabtu tanggal 16 April 2011 pukul 18.00 wib.

15. Ibid hal, 180

kesejahteraan sosial. Berangkat dari pemikiran ini, maka tujuan sistem peradilan pidana anak terpadu lebih ditekankan kepada upaya pertama (resosialisasi dan rehabilitasi) dan ketiga (kesejahteraan sosial). Namun upaya lain diluar mekanisme pidana atau peradilan dapat dilakukan dengan beberapa metode diantaranya metode Diversi dan Restorative Justice. Diversi adalah pengalihan penanganan kasus kasus anak yang diduga telah melakukan tindak pidana dari proses formal dengan atau tanpa syarat. Pendekatan diversi dapat diterapkan bagi penyelesaian kasus-kasus anak yang berkonflik dengan hukum.

Adapun yang menjadi tujuan upaya diversi adalah :

- Untuk menghindari anak dari penahanan;
- Untuk menghindari cap/label anak sebagai penjahat;
- Untuk mencegah pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak;
- Agar anak bertanggung jawab atas perbuatannya;
- Untuk melakukan intervensi-intervensi yang diperlukan bagi korban dan anak tanpa harus melalui proses formal
- Menghindari anak mengikuti proses sistem peradilan;
- Menjauhkan anak dari pengaruh dan implikasi negatif dari proses peradilan.

Program diversi dapat menjadi bentuk restoratif justice jika :

- Mendorong anak untuk bertanggung jawab atas perbuatannya;
- Memberikan kesempatan bagi anak untuk mengganti kesalahan yang dilakukan dengan berbuat kebaikan bagi si korban;
- Memberikan kesempatan bagi si korban untuk ikut serta dalam proses;
- Memberikan kesempatan bagi anak untuk dapat mempertahankan hubungan dengan keluarga;
- Memberikan kesempatan bagi rekonsiliasi dan penyembuhan dalam masyarakat yang dirugikan oleh tindak pidana.¹⁶

16. [http:// Blog_pada_WordPress.com](http://Blog_pada_WordPress.com). [Anjar's Blog](#). [KONSEP DIVERSI DAN RESTORATIVE JUSTICE](#) . Diakses hari Selasa tanggal 20 April 2011 pukul 13.00 wib.

c) Tujuan Penerapan Konsep Diversi

Prinsip utama pelaksanaan konsep diversi yaitu tindakan persuasif atau pendekatan non penal dan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahan¹⁷. Petugas dalam melaksanakan diversi menunjukkan pentingnya ketaatan kepada hukum dan aturan. Petugas melakukan diversi dengan cara pendekatan persuasif dan menghindari penangkapan yang menggunakan tindakan kekerasan dan pemaksaan untuk mengalihkan suatu kasus dari proses formal ke proses informal. Proses pengalihan ditujukan untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

Tindakan kekerasan saat penangkapan membawa sifat keterpaksaan sebagai hasil dari penegakan hukum. Penghindaran penangkapan dengan kekerasan dan pemaksaan menjadi tujuan dari pelaksanaan diversi. Tujuannya menegakkan hukum tanpa melakukan tindakan kekerasan dan menyakitkan dengan memberi kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahannya tanpa melalui hukuman pidana oleh negara yang mempunyai otoritas penuh. Salah satu contoh latar belakang pentingnya kebijakan diversi dilakukan karena tingginya jumlah anak yang masuk ke peradilan pidana dan diputus dengan penjara dan mengalami kekerasan saat menjalani rangkaian proses dalam sistem peradilan pidana, yaitu Philipina. Di negara Philipina angka keterlibatan anak dengan tindak pidana dan

17. [http:// doktormarlina.htm](http://doktormarlina.htm) Marlina, Penerapan Konsep Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak .Diakses hari sabtu tanggal 16 April 2011 pukul 18.00 wib.

menjalani peradilan sampai pemenjaraan cukup tinggi dan 94% adalah anak pelaku pidana untuk pertama kalinya (first-time offender). Jumlah anak yang menjalani pemenjaraan tidak diiringi dengan adanya kebijakan diversi dan program pencegahan tindak pidana anak secara formal, sebaliknya usaha dukungan untuk mengembalikan anak ke komunitasnya sangat rendah. Diversi dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar hukum agar menjadi orang yang baik kembali melalui jalur non formal dengan melibatkan sumber daya masyarakat.

Diversi berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum sebagai pihak penegak hukum. Kedua keadilan tersebut dipaparkan melalui sebuah penelitian terhadap keadaan dan situasi untuk memperoleh sanksi atau tindakan yang tepat (appropriate treatment) Tiga jenis pelaksanaan program diversi yaitu

1. Pelaksanaan kontrol secara sosial (social control orientation), yaitu aparat penegak hukum menyerahkan pelaku dalam tanggung jawab pengawasan atau pengamatan masyarakat, dengan ketaatan pada persetujuan atau peringatan yang diberikan. Pelaku menerima tanggung jawab atas perbuatannya dan tidak diharapkan adanya kesempatan kedua kali bagi pelaku oleh masyarakat.
2. Pelayanan sosial oleh masyarakat terhadap pelaku (social service orientation), yaitu melaksanakan fungsi untuk mengawasi, mencampuri, memperbaiki dan menyediakan pelayanan pada pelaku dan keluarganya. Masyarakat dapat mencampuri keluarga pelaku untuk memberikan perbaikan atau pelayanan.
3. Menuju proses restorative justice atau perundingan (balanced or restorative justice orientation), yaitu melindungi masyarakat, memberi kesempatan pelaku bertanggung jawab langsung pada korban dan masyarakat dan membuat kesepakatan bersama antara korban pelaku dan masyarakat.

Pelaksanaannya semua pihak yang terkait dipertemukan untuk bersama-sama mencapai kesepakatan tindakan pada pelaku.

d) Pelaksanaan Diversi

Pelaksanaan diversi dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. Pelaksanaan diversi oleh aparat penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut discretion atau dalam bahasa Indonesia diskresi.

Dengan penerapan konsep diversi bentuk peradilan formal yang ada selama ini lebih mengutamakan usaha memberikan perlindungan bagi anak dari tindakan pemenjaraan. Selain itu terlihat bahwa perlindungan anak dengan kebijakan diversi dapat dilakukan di semua tingkat peradilan mulai dari masyarakat sebelum terjadinya tindak pidana dengan melakukan pencegahan. Setelah itu jika ada anak yang melakukan pelanggaran maka tidak perlu diproses ke polisi.

Selanjutnya jika anak yang melakukan pelanggaran sudah terlanjur ditangkap oleh polisi dalam setiap pemeriksaan peradilan untuk dapat meleakukan diversi dalam bentuk menghentikan pemeriksaan demi pelindungan terhadap pelaku anak. Kemudian apabila kasus anak sudah sampai di pengadilan, maka hakim dapat mengimplementasikan ide diversi demi kepentingan pelaku anak tersebut yang sesuai dengan prosedurnya dan diutamakan anak dapat dibebaskan dari pidana penjara. Terakhir bila anak sudah terlanjur berada di dalam penjara, maka petugas penjara dapat membuat kebijakan diversi terhadap anak sehingga anak dapat di limpahkan ke

lembaga sosial, atau sanksi alternatif yang berguna bagi perkembangan dan masa depan anak tapi diversi untuk mengeluarkan dari sistem peradilan. Satu hal utama dari bentuk ini yaitu sikap kehati-hatian dari polisi, dimana anak muda yang telah ditangani polisi hanya diberikan peringatan lisan dan tertulis, setelah itu anak akan dilepas dan merupakan akhir dari permasalahan terkecuali kalau anak tersebut melakukan pelanggaran selanjutnya (mengulangi) maka akan dilakukan proses lanjutan.

Selanjutnya untuk membedakan dan menentukan mana yang baik dan buruk bagi dalam melakukan perbuatan melanggar hukum adalah tindakan yang menyangkut aspek moral dan kejiwaan. Tanpa memiliki kekuatan moral dan kejiwaan ini, seseorang tidak dapat diminati pertanggungjawabannya hukum atas tindakan yang dilakukan serta adanya unsur kesalahan, artinya apakah benar anak melakukan perbuatan yang dapat dipidana atau dilarang oleh Undang-Undang. Hal ini untuk menghindari asas *Green Straf Zonder Schuld* (tidak ada pidana, jika tidak ada kesalahan) kemudian dapat dibedakan juga mengenai keakurasian alat bukti yang diajukan penuntut umum dan terdakwa untuk membuktikan kebenaran surat dakwaan. Alat bukti ini, minimal harus dua, jika tidak terpenuhi, terdakwa tidak dapat dipidana hal tersebut sesuai dengan KUHP (Pasal 184). Hal ini sesuai dengan asas *unus testis nullus testis* artinya suatu alat bukti bukanlah suatu alat bukti.

e) Dasar Hukum dalam Penerapan Diversi Menurut Hukum Perlindungan Anak

Penahanan yang dilakukan terhadap anak tetap berpedoman kepada aturan hukum mengenai hak anak yang tercantum dalam aturan yang ada mengenai hak anak yaitu konvensi hak anak, UU Pengadilan nak dibedakan tempat penahannya dengan orang dewasa pemenuhan fasilitas yang melindungi perkembangan anak, pendidikan, hobi, akses dengan keluarga, perlindungan hak propesi anak, perlindungan dari penyiksaan dan perlakuan fisik dan mental dan proses peradilan yang singkat dan cepat.

Anak ditentukan berdasarkan perbedaan umur anak, yaitu bagi anak yang masih di 8 – 18 tahun dan melakukan tindak pidana setelah melampaui batas usia 18 tahun hal tersebut sesuai dengan UU Perlindungan Anak, hak asasi manusia dan Beijing Rulis.¹⁸

berumur 8 (delapan) tahun sampai 12 (dua belas) tahun hanya dapat dikenakan tindakan, seperti dikembalikan kepada orang tuanya, ditempatkan pada organisasi social atau diserahkan kepada Negara, sedangkan terhadap anak yang telah mencapai umur diatas umur 12 (dua belas) tahun sampai 18 (delapan belas) tahun dijatuhkan pidana Perbedaan perlakuan tersebut didasarkan atas pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosiologi, psikologis, pedegogis

18. Marlina, Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice, Reflika Aditama, 2009, hal 127

(pendidikan) sosial anak.¹⁹ Dasar pertimbangan ini dalam pertimbangan pemindanaan anak di bawah umur tidaklah relevan kalau menggunakan tiga teori klasik yaitu :

- 1) Teori absolute atau pembalasan yaitu dalam teori pembalasan diharapkan dapat menjarakan pelaku tindak pidana
- 2) Teori relative atau tujuan yaitu tidak seluruhnya dapat dikesampingkan dalam pemindanaan anak di bawah umur sebab teori ini tidak saja masih mempertimbangkan kepentingan pelaku, korban, masyarakat tetapi juga kepentingan masa depan pelaku, termasuk juga memberikan pendidikan terhadap anak agar menjadi insaf dan sadar, tidak mau mengulangi lagi perbuatannya dan dapat menjadi manusia yang baik.
- 3) Teori gabungan atau konvergensi yaitu teori yang mengambil dari teori pembalasan dan teori relative di atas, jelas tidak relevan lagi dengan teori pemindanaan pada saat sekarang, karena dalam teori yang masih berlaku teori pembalasan yang hanya memandang kejadian masa lampau tanpa memandang kepentingan masa depan pelaku tindak pidana yang acapkali menimbulkan penderitaan tanpa batas.

Dengan demikian Mengingat pada pasal 67 bahwa berlakunya undang-undang no 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak maka pasal 45, 46 dan 47 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dinyatakan tidak berlaku, jadi perbedaan perlakuan dan sanksi pidana dapat diatur dalam

19. Ibid, 34

Undang-Undang No 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak pasal 22 – 34 dan UU NO 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 16 – 18 dimaksudkan untuk lebih melindungi dan mengayomi anak yang bermasalah dengan hukum agar dapat menyongsong masa depannya.

f) Hambatan Yang Ditimbulkan Dalam Proses Penerapan Diversi dalam Sistem Peradilan Anak

a. Hambatan Internal

Walaupun keadilan Restoratif Justice dan Diversi sudah mulai dikenal sebagai alternatif penanganan anak berhadapan dengan hukum dari peradilan pidana dan mulai mendapatkan dukungan banyak pihak masih banyak hambatan yang dihadapi oleh sistem peradilan anak yaitu :

- a) Kebutuhan yang semakin meningkat tidak sebanding dengan sumber daya (baik personel maupun fasilitas)
- b) Pemahaman yang berbeda dalam penanganan anak berhadapan dengan hukum dan korban di antara aparat penegak hukum
- c) Kurangnya kerja sama antara pihak yang terlibat (aparat penegak hukum dan pekerja sosial anak)
- d) Permasalahan etika dan hambatan birokrasi dalam penukaran data dan informasi antara aparat penegak hukum
- e) Koordinasi antara aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim, Advokat, Bapas, Rutan, Lapas) masih tersendat karena kendala ego sektoral

- f) Belum ada persamaan persepsi antar-aparat penegak hukum mengenai penanganan anak berhadapan dengan hukum untuk kepentingan terbaik bagi anak
- g) Terbatasnya sarana dan prasarana penanganan anak berhadapan dengan hukum selama proses pengadilan (pra dan pasca putusan pengadilan)²⁰
- h) Kurangnya kebijakan formulasi untuk melaksanakan proses rehabilitasi sosial anak nakal dalam hal ini Departemen sosial atau Organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja sehingga dapat dikirim kepanti sosial untuk dibina secara khusus diberi pemulihan mental dan perilaku
- i) Kurangnya perlindungan anak yang melakukan tindak pidana namun kehendak demikian tidaklah mudah dilakukan karena karena ketentuan dalam sistem pemasyarakatan anak saat ini tidak memberi peluang yang demikian

b. Hambatan Eksternal

Bahwa dalam menerapkan sistem Restoratif Justice dan Diversi masih banyak hambatan eksternal yang ditimbulkan yaitu

a. Ketiadaan payung hukum

Belum adanya payung hukum menyebabkan tidak semua pihak memahami implementasi keadilan restoratif dengan tujuan pemulihan bagi pelaku, korban, dan masyarakat.

20. DS.Dewi,Fatahilla A.Syukur, Mediasi Penal : Penerapan Restorative Justice Di Pengadilan AnakIndonesia,Indie Pre Publishing, Depok,2011,hal 59

Akibatnya sering ada pihak-pihak yang mengintervensi jalannya proses mediasi. dengan ketentuan UU pasal 16 (3) tentang perlindungan anak yang menyebutkan bahwa penangkapan, penahanan, penjatuhan hukuman pidana bagi anak adalah upaya terakhir

b. Inkonsistensi penerapan peraturan

Belum adanya payung hukum sebagai landasan dan pedoman bagi semua lembaga penegak hukum, inkonsistensi penerapan peraturan di lapangan dalam penanganan anak berhadapan dengan hukum masalah yang paling sederhana dapat dilihat pada beragamnya batasan yang menjadi umur minimal seorang anak pada peraturan-peraturan yang terkait. Akibatnya aparat penegak hukum membuat putusan yang tidak konsisten dalam kasus anak berhadapan dengan hukum yang memiliki kemiripan unsur-unsur perbuatan.

c. Kurangnya dukungan dan kerja sama antar lembaga

Masalah ini merupakan hambatan yang lain yang masih banyak terjadi dalam menegakkan suatu ketentuan hukum, termasuk penanganan anak berhadapan dengan hukum banyak kalangan profesional hukum yang masih menganggap mediasi sebagai metode pencarian keadilan kelas dua yang mereka tidak berhasil mencapai keadilan sama sekali, padahal saat ini hakim adalah satu-satu pihak yang bisa memediasi perkara anak yang berhadapan dengan hukum tidak seperti mediasi perdata yang memperbolehkan non-hakim menjadi mediator di pengadilan.²¹

1.6. Jenis dan Tipe Penelitian

Penelitian ini tergolong sebagai penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan yang sepenuhnya mempergunakan data sekunder, maka penyusunan kerangka teoritis yang bersifat tentatif dapat ditinggalkan. Akan tetapi, penyusunan kerangka konsepsional mutlak diperlukan. Di dalam menyusun kerangka konsepsional, dapat dipergunakan perumusan yang terdapat di dalam peraturan perundang

21. Ibid hal 60

yang dapat dijadikan dasar penelitian, atau yang hendak diteliti. Dan penelitian hukum normatif tidak diperlukan penyusunan atau perumusan hipotesa. Hipotesa kerja diperlukan, yang biasanya mencakup sistematika kerja dalam proses penelitian .

1.6.1. Sumber Data dan Bahan Hukum

1.6.2. Jenis Data

Data merupakan hasil penelitian baik yang berupa fakta-fakta atau angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi, yang dikatakan informasi adalah hasil pengolahan data yang dipakai untuk suatu keperluan. Adapun data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah :

(1) Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui teknik wawancara dengan responden observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diamati oleh peneliti.

(2) Data Sekunder

Data yang diperoleh dari informasi yang dikumpulkan dan dokumen resmi yang ada dan buku-buku literatur, laporan penelitian, dan media-media yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

1.6.3. Bahan Hukum

Bahan hukum dapat menunjuk kepada atau di mana data dapat diperoleh. Karena penelitian pada dasarnya usaha mencari data dalam rangka menjawab suatu masalah secara tepat atau baik, maka pada

dasarnya tiap permasalahan perlu dipilih jenis atau apa yang ingin dicari dan dimana sumber datanya. Yang dimaksud dengan bahan hukum dalam penelitian ini adalah subjek dimana data diperoleh dapat berupa dokumen pribadi, data pribadi yang tersimpan di lembaga-lembaga di tempat atau yang bersangkutan pernah berkerja atau data arsip .

(1) Bahan hukum Primer

Bahan Hukum yang diperoleh secara langsung di lapangan, dalam hal ini adalah informasi dari para pegawai atau Hakim di Pengadilan Negeri Lamongan yang berkaitan dengan kasus tersebut atau bahan-bahan hukum yang mengikat antara lain perundang-undangan

(2) Bahan hukum Sekunder

Bahan Hukum yang diperoleh dari kepustakaan antara lain buku-buku literatur, laporan penelitian serta media yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

(3) Bahan hukum tersier

Bahan-bahan yang memberikan petunjuk, penjelasan, dan informasi terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder

1.6.4. Metode Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

a. Studi Kepustakaan (Library Research)

Studi Kepustakaan

- a) Yaitu dilakukan dengan cara mempelajari, mengumpulkan pendapat para pakar hukum yang dapat dibaca dari literatur,

perundang-undangan, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian²²

b) Interview atau wawancara

Yaitu teknik pengumpulan data yang mengadakan tanya jawab langsung dengan responden guna memperoleh data baik lisan maupun tulisan atau sejumlah keterangan data yang diperlukan.

1.6.5. Metode Analisis Data

Metode analisa data merupakan hal yang terpenting agar data yang sudah terkumpul dengan cara yang dapat dipertanggung jawabkan dapat menghasilkan jawaban dari permasalahan. Sehingga peneliti menggunakan metode penelitian deskriptis analistis, analistis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang menjadi rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.²³

1.6.6. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian, lokasi penelitian adalah di Pengadilan Negeri Lamongan :

Karena disana kota yang terpencil dan daerah yang rawan pasti terdapat berbagai macam kejahatan-kejahatan yang ada di dalam kota tersebut.

22. Ibid hal 107

23. Ibid hal 107

Alasan-alasan tersebut yang menjadikan keinginan penulis untuk melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Lamongan.

1.6.7. Sistematika Penulisan

Untuk lebih memudahkan mengikuti uraian skripsi ini, maka disusun menurut urutan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan. Didalamnya menguraikan tentang latar belakang masalah, kemudian berdasarkan masalah tersebut maka dirumuskan permasalahan. Selanjutnya disajikan tujuan dan manfaat penelitian sebagai harapan yang ingin dicapai melalui penelitian ini. Pada bagian kajian pustaka yang merupakan landasan dari penulisan skripsi. Kemudian diuraikan beberapa konsep definisi yang berkaitan dengan judul penelitian. Selanjutnya diuraikan tentang metode penelitian yang merupakan salah satu syarat dalam setiap penelitian. Intinya mengemukakan tentang tipe penelitian dan pendekatan masalah, sumber bahan hukum, langkah penelitian, dan bab ini di akhiri dengan sistematika penulisan.

BAB II dalam hal ini membahas tentang permasalahan yang pertama yakni mengenai tentang pertimbangan hakim dalam memberikan putusan diversi atas kasus No.227/PidB/2010/PN.Lmg. Dalam Bab II dibagi dalam empat sub bab, Sub Bab pertama membahas mengenai disposisi kasus No.227/PidB/2010/PN.Lmg, Sub Bab yang kedua membahas tentang faktor pertimbangan hakim atas putusan kasus No: 227/PidB/2010/PN.Lmg, Sub Bab yang ketiga membahas mengenai

analisa pertimbangan hakim atas putusan kasus No: 227/227/PidB/2010/PN.Lmg.

BAB III dalam hal ini akan membahas tentang permasalahan yang kedua membahas yaitu hambatan dalam penerapan diversi atas peradilan anak, dapat di bagi dalam satu sub Bab, Sub Bab pertama mengenai analisis hambatan atas kasus No:227/PidB/2010/PN.Lmg.

BAB IV atau bab penutup dari penulisan skripsi ini , yakni memuat ringkasan dari seluruh uraian dan pembahasan untuk selanjutnya disampaikan kesimpulan dari seluruh pembahasan dan saran-saran yang dianggap perlu.